

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. A. Yani 152 C, Telp/Fax (031) 8292591 SURABAYA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dapat tersusun. LKjIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka LKjIP menjadi hal penting dalam pertanggungjawaban kinerja sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas instansi pemerintah atas pelaksanaan anggaran dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun dalam rangka menyampaikan tingkat kemajuan kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk perwujudan komitmen pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

Dengan memohon Ridhlo Allah SWT atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, kami berharap penyajian Laporan Kinerja ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya reformasi birokrasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Lampiran .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Struktur Organisasi .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	3
C. Isu Strategis .....	3
D. Cascading Kinerja .....	5
E. Peta Proses Bisnis .....	6
F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
B. Realisasi Anggaran .....	24
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi .....	26
BAB IV PENUTUP .....	27
LAMPIRAN	



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Form Pendanaan Indikatif Pada Renstra
2. Perjanjian Kinerja
3. Rekapitulasi Data



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Struktur Organisasi**

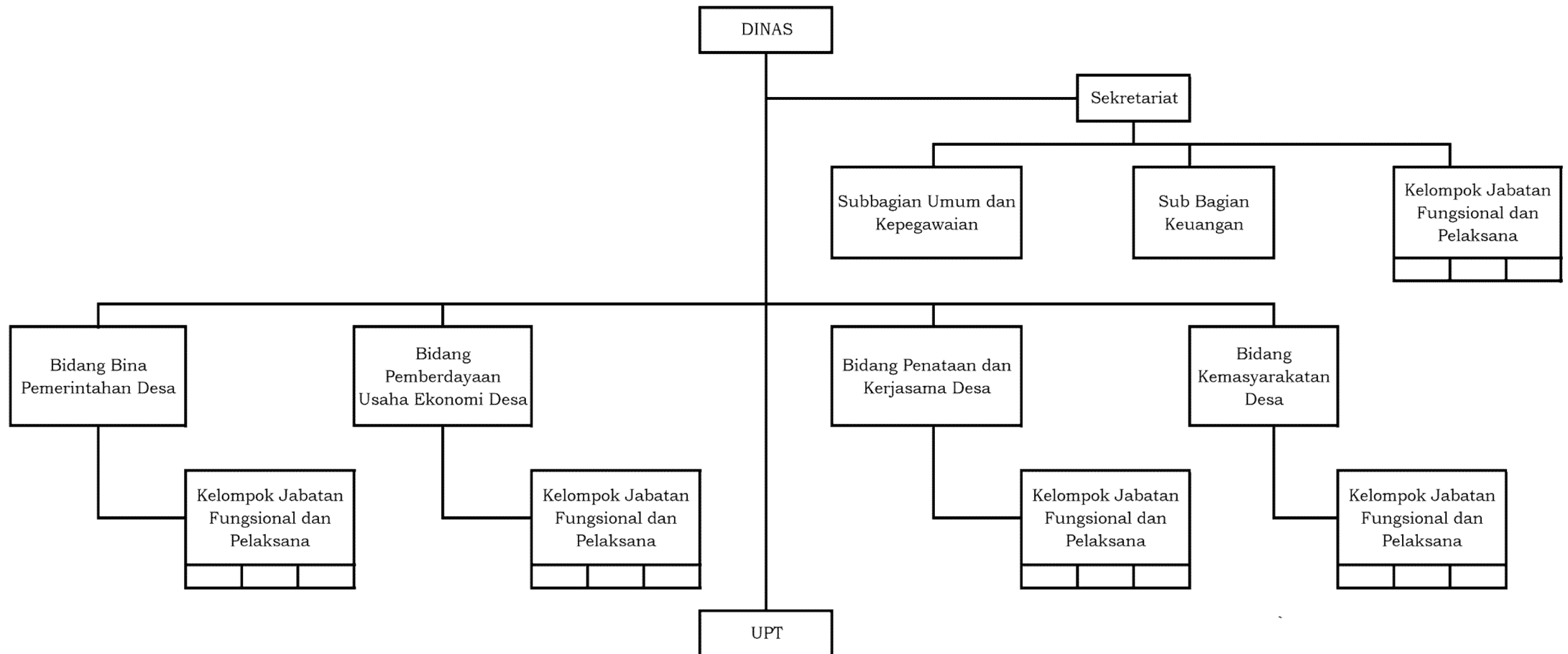
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur meliputi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa, Bidang Penaaan dan Kerjasama Desa, Bidang Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 116) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas sebagaimana disajikan dalam Bagan 1.1 dibawah ini.



**Bagan 1.1. Struktur organisasi**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR**





## B. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
2. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024;
3. Rencana Kerja Perubahan tahun 2023;
4. Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2023/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023;
5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

## C. Isu Strategis

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya. Untuk itu, pembangunan Jawa Timur 2019 - 2024 berangkat dari landasan visi: ***“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”***.



Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2019 – 2024 tersebut, maka Misi Ke-2 pembangunan Jawa Timur 2019 – 2024 adalah : “Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan”.

Berdasarkan visi misi, maka hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dimaksud tertuang dalam 8 tujuan, 25 sasaran dengan 11 indikator kinerja utama. Adapun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan, mendukung pencapaian kinerja pada Misi ke-2 Tujuan ke-2 (Menurunkan angka kemiskinan) dan sasaran ke 11 (Menurunnya penduduk miskin perdesaan).

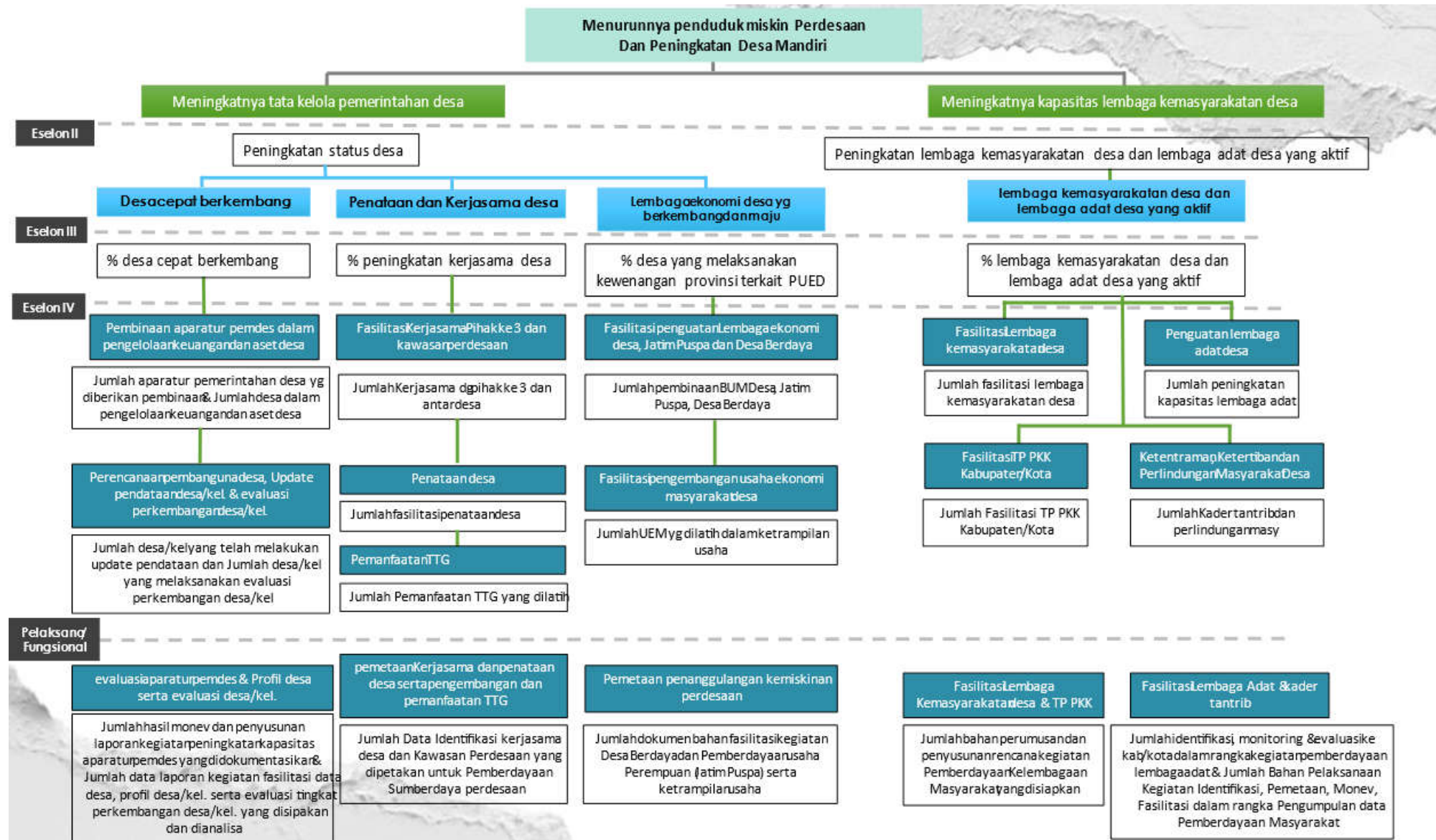
Kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensi yang tidak hanya mencakup kebutuhan konsumsi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memperoleh akses – akses kehidupan pendidikan, kesehatan, akses terhadap air bersih. Hal tersebut memerlukan dukungan penanganan multisektor, koordinasi dan integrasi data di tingkat pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan. Kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin akan dapat menambah angka kemiskinan.

Isu strategis yang mendasar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar di Jawa Timur di bandingkan nasional berdasarkan berita resmi statistik. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus berupaya melakukan langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui upaya pelaksanaan program – program pemberdayaan masyarakat.



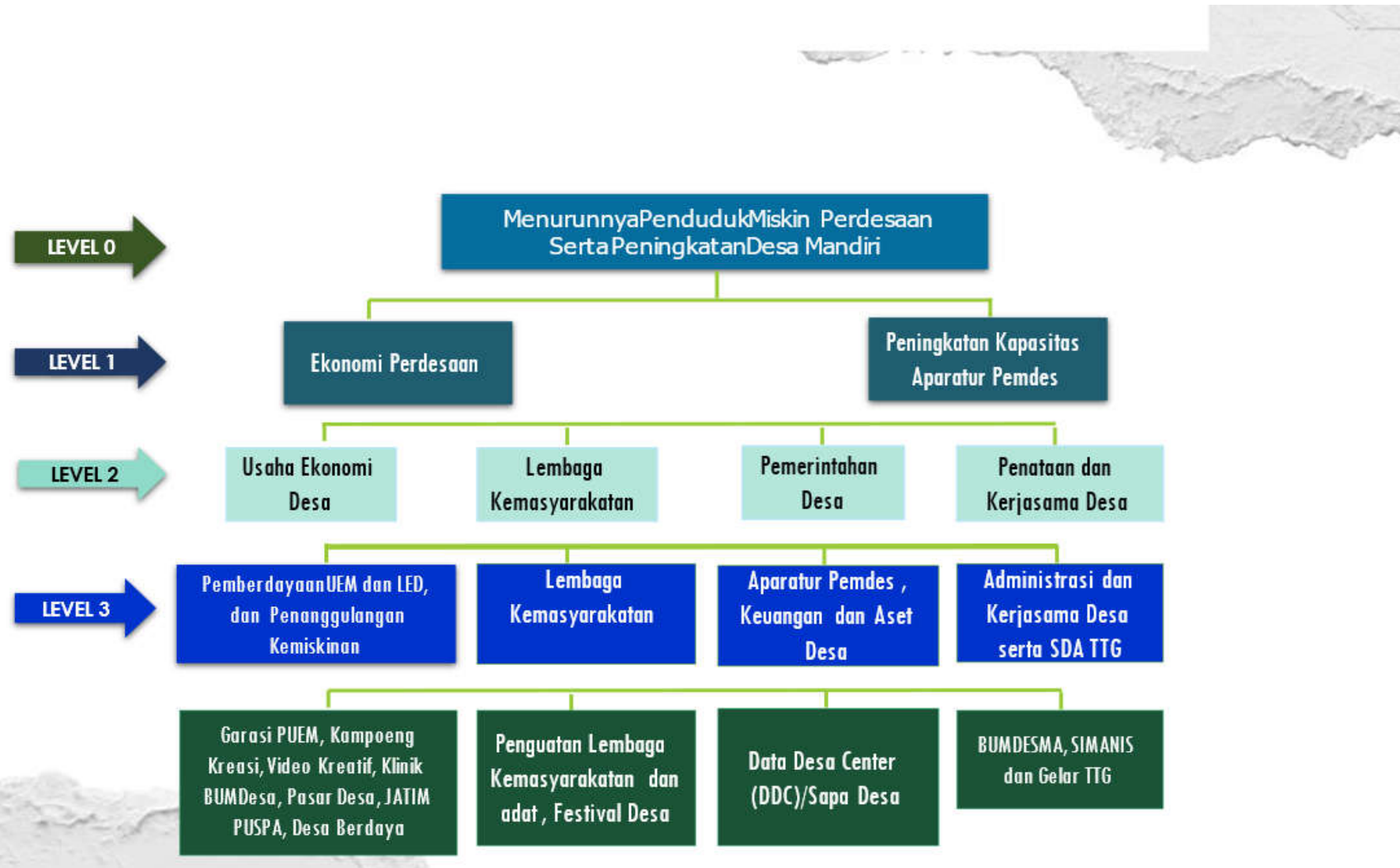


### D. Cascading Kinerja





### E. Peta Proses Bisnis





# Pohon Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Jawa Timur





## F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai peran yang sangat strategis untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiskinan di Jawa Timur. RPJMD Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 menjelaskan bahwa visi dan misi pembangunan daerah adalah Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong dan misi pembangunan daerah ke-2 adalah Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.

Berlandaskan visi dan misi tersebut maka pembangunan Daerah di Jawa Timur difokuskan pada upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Hasil kinerja sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penurunan kemiskinan yang di dukung salah satunya oleh kinerja program – program pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukkan hasil yang positif, pada tahun 2023 kemiskinan mengalami penurunan meskipun belum signifikan. Presentase penduduk miskin pada bulan September 2021 sebesar 10,59 %, sedangkan pada September 2022 menjadi sebesar 10,49 %. Pada bulan Maret 2023 menjadi sebesar 10,35 % atau turun sebesar 0,14 % dari September tahun 2022. Persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2023 masih lebih tinggi dari angka nasional yaitu 9,36 % hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk terus berupaya melakukan langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui upaya pelaksanaan program – program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur mengacu pada Tujuan, Kebijakan dan Program, dengan memperhatikan strategi dan prioritas pembangunan di Jawa Timur. Arah Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan sebagai berikut :



1. Program Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 3 sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2023. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 3 indikator kinerja, pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan pada tabel berikut di bawah ini :

Pencapaian Kinerja Sasaran

<b>Sasaran Strategis 1</b>			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	86 %	87,06 %	101,23 %
<b>Sasaran Strategis 2</b>			
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Persentase peningkatan status desa	12 %	23,35 %	194,54 %
<b>Sasaran Strategis 3</b>			
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,65 %	6,34 %	173,88 %
<b>RATA – RATA</b>			<b>156,55 %</b>

Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas, rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timu adalah sebesar 156,55 %, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja 3 sasaran adalah sangat baik (didas 100 %).

Pencapaian kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana rata-rata tahun 2022 pencapaian kinerja adalah sebesar 705,58 % sedangkan pada tahun 2023 sebesar 150,79 %, hal tersebut disebabkan antara lain optimalisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan manajemen yang lebih baik, koordinasi antar pemangku kepentingan yang lebih intensif serta pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian technical asistance kepada kelompok sasaran.

Dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 untuk indikator sasaran 1 yaitu Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari target RPJMD/Renstra 2019 – 2024 sebesar 86 % telah tercapai pada tahun keempat sebesar 87,06 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 101,23 %, untuk indikator sasaran 2 yaitu Persentase peningkatan status desa dari target RPJMD/Renstra 2019 – 2024 sebesar 55 %, telah tercapai pada tahun keempat RPJMD sebesar 23,35 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 42,45, untuk indikator sasaran 3 yaitu Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif dari target RPJMD/Renstra 2019 – 2024 sebesar 10,91 telah tercapai pada tahun keempat sebesar 6,34 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 58,09 %.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasi anggaran, realisasi pencapaian kinerja lebih tinggi daripada realisasi anggaran, Tingkat pencapaian Realisasi anggaran Tahun 2023 adalah sebesar 96,34 % sedangkan realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar 156,55 % maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Hasil pencapaian kinerja secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa terutama pada tujuan pengentasan kemiskinan, tentunya didukung oleh berbagai sektor dan kebijakan yang secara terpadu dalam program penanggulangan kemiskinan.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini yang dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.



Tujuan dan sasaran serta indicator sasaran Selengkapnya sebagaimana Tabel 2.1

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Periode
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	86
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa	13 %
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,82 %

Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	86
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa	12 %
3	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,65 %





### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja merupakan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai sehingga diperoleh gambaran terwujudnya akuntabilitas organisasi. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan Kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengukurannya, pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel III.1. Pencapaian Kinerja Sasaran

<b>Sasaran Strategis 1</b>			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	86	87,06	101,23 %
<b>Sasaran Strategis 2</b>			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase peningkatan status desa	12 %	23,35	194,54 %
<b>Sasaran Strategis 3</b>			
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,65 %	6,34 %	173,88 %
<b>RATA – RATA</b>			<b>156,55 %</b>



Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas, rata – rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 156,55 %.

Pencapaian kinerja **Sasaran Strategis 1**. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1

<b>Sasaran Strategis 1</b>			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	86	87,06 %	101,23 %

Berdasarkan Tabel III.2 diatas, kinerja Sasaran 1 diukur dengan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja indikator sasaran Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari target sebesar 86 % terealisasi sebesar 87,06 % atau tingkat pencapaian sebesar 101,23 %. Hal ini didukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2023 untuk indikator kinerja Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan diperbandingkan dengan pencapaian tahun – tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 dari target sebesar 86 % terealisasi sebesar 86,99 % atau tingkat pencapaian sebesar 101,15 %. Sedangkan tahun 2021 dari target sebesar 84 % terealisasi sebesar 86,96 % atau tingkat pencapaian sebesar 103,52 %. Selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel III.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

<b>Sasaran Strategis 1</b>			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( <b>Tahun 2023</b> )	86 %	87,06 %	101,23 %



Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( <b>Tahun 2022</b> )	86	86,99	101,15%
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( <b>Tahun 2021</b> )	84	86,96 %	103,52

Capaian kinerja Sasaran 1 pada tahun 2023 merupakan Capaian jangka menengah pada tahun keempat dan apabila dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 untuk indikator sasaran 1 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dari target RPJMD/Renstra 2019 – 2024 sebesar 86 % telah tercapai pada Tahun keempat sebesar 87,06 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 101,23 %, selengkapnyanya sebagaimana Tabel III.4. dibawah ini.

Tabel III.4. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 s/d Akhir Periode RPJMD

<b>Sasaran Strategis 1</b>			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target akhir RPJMD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Tingkat Kemajuan</b>
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	86 %	87,06 %	101,23 %

Indikator sasaran ini bisa mencapai target yang ditetapkan dikarenakan baik dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan adminisrasi keuangan serta kepegawaian dan ketatausahaan berjalan tepat waktu.

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja dengan pelaksanaan manajemen kerja yang terencana baik, terkoordinasi secara intensif dan loyalitas kinerja seluruh pegawai. Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dijalankan dapat terwujud melalui strategi – strategi yang optimal sebagai penunjang utama dalam keberhasilan pencapaian kinerja.

Pencapaian kinerja **Sasaran Strategis 2**, yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa. Sasaran strategis 2 ini diukur dengan indikator kinerja Persentase peningkatan status desa. Indikator Persentase peningkatan status desa ini merupakan ukuran Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, Desa Cepat Berkembang menurut Permendagri dimaksud adalah desa yang dikategorikan efektif dalam



penyelenggaraan urusan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dengan indikator sebagaimana dicantumkan dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015.

Data pencapaian kinerja sasaran 2 sebagaimana Tabel III.5 di bawah ini, Capaian kinerja indikator Persentase peningkatan status desa pada tahun 2023, dari target 12 % tercapai 23,35 % atau tingkat pencapaian sebesar 194,54 %. Hal ini didukung pembinaan intens dari Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja profil desa/kelurahan untuk melakukan update pengukuran tingkat perkembangan desa serta pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak di perdesaan.

Tabel III.5. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2

<b>Sasaran Strategis 2</b>			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Persentase peningkatan status desa	12 %	23,35 %	194,54

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2023 untuk indikator kinerja Persentase peningkatan status desa akan diperbandingkan dengan pencapaian tahun – tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 dari target sebesar 11 % terealisasi sebesar 108,07 % atau tingkat pencapaian sebesar 982, %. Sedangkan tahun 2021 dari target sebesar 10 % terealisasi sebesar 32,41 % atau tingkat pencapaian sebesar 324,10 %. Selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel III.6. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

<b>Sasaran Strategis 2</b>			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa			
<b>Target</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Persentase peningkatan status desa <b>(Tahun 2023)</b>	12 %	23,35 %	194,54
Persentase peningkatan status desa <b>(Tahun 2022)</b>	11 %	108,07 %	982,44
Persentase peningkatan status desa <b>(Tahun 2021)</b>	10 %	32,41 %	324,10 %

Capaian kinerja Sasaran 2 pada tahun 2023 merupakan Capaian jangka menengah pada tahun keempat dan apabila dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 sebagaimana



dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 untuk indikator sasaran 2 yaitu Persentase peningkatan status desa sebesar 55 % telah tercapai pada tahun keempat sebesar 23,35 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 42,45 % selengkapnya sebagaimana tabel III.7. dibawah ini.

Tabel III.7. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Akhir Periode RPJMD

<b>Sasaran Strategis 2</b>			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target akhir RPJMD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Tingkat Kemajuan</b>
Persentase peningkatan status desa	55 %	23,35 %	42,45 %

Pencapaian kinerja dapat memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan didukung pembinaan intens dari Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja profil desa/kelurahan untuk melakukan update pengukuran tingkat perkembangan desa. Penggunaan sumber daya yang efisien dalam pencapaian target kinerja dengan memaksimalkan potensi aparatur pemerintahan desa dan keterlibatan para pendamping desa yang membantu dalam pendampingan ke masyarakat desa.

Kegiatan – kegiatan yang bersentuhan langsung baik dengan aparatur pemerintahan desa maupun dengan masyarakat sehingga dapat menunjang pencapaian target kinerja.

Pencapaian kinerja **Sasaran Strategis 3**, yaitu Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.8. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3

<b>Sasaran Strategis 3</b>			
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,65 %	6,34 %	173,88 %

Berdasarkan Tabel III.8 tersebut, kinerja Sasaran strategis 3 ini diukur dengan indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif. Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif adalah Lembaga kemasyarakatan



desa (LPMD dan TP PKK) yang sesuai struktur dan siap melayani masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa. Pencapaian indikator kinerja Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif tahun 2023 dari target sebesar 3,65 %, terealisasi sebesar 6,34 % atau tingkat pencapaian sebesar 173,88 %.

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2023 untuk indikator kinerja Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif akan diperbandingkan dengan pencapaian tahun – tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja sasaran untuk Indikator kinerja Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif merupakan indikator yang baru diukur pada tahun 2022, sedangkan tahun 2021 dengan indikator yang lain sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, walaupun demikian akan tetap membandingkan untuk persentase pencapaiannya. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif untuk tahun 2021 dari target sebesar 18,97 % terealisasi sebesar 21,18 % atau tingkat pencapaian sebesar 111,66 %. Selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel III.9. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

<b>Sasaran Strategis 3</b>			
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa			
<b>Target</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif <b>(Tahun 2023)</b>	3,65 %	5,71 %	156,60 %
Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif <b>(Tahun 2022)</b>	3,44 %	35,58 %	1034,30 %
Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif <b>(Tahun 2021)</b>	18,97 %	21,18 %	111,66 %

Capaian kinerja Sasaran 2 pada tahun 2023 merupakan Capaian jangka menengah pada tahun keempat dan apabila dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 untuk indikator sasaran 3 yaitu Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat



desa yang aktif dari target RPJMD/Renstra 2019 – 2024 sebesar 10,91 % telah tercapai pada tahun keempat sebesar 6,34 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 58,09 %, selengkapnya sebagaimana tabel III.10. dibawah ini.

Tabel III.10. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 s/d Akhir Periode RPJMD

<b>Sasaran Strategis 3</b>			
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target akhir RPJMD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Tingkat Kemajuan</b>
Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	10,91 %	6,34 %	58,09 %

Pencapaian kinerja ini melampaui target kinerja, hal ini didukung oleh pembinaan dan bimbingan secara intens dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat desa di desa dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat untuk kemajuan desa.

Penggunaan sumberdaya yang efisien dalam menunjang kinerja untuk memenuhi target kinerja didukung oleh pelaksanaan manajemen yang cukup baik, koordinasi antar pemangku kepentingan cukup intensif. Kegiatan – kegiatan fasilitasi penataan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan adat istiadat, dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai target kinerja.

Untuk alokasi anggaran per sasaran pembangunan dan program serta tingkat efisiensi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2023 beserta realisasi anggaran sebagaimana tabel III.11. dan III.12. dibawah ini.



Tabel III.11. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>% ANGGARAN</b>
<b>1</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	23.803.177.104	45,27 %
<b>2</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa	28.723.371.250	39,91 %
<b>3</b>	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	12.763.274.750	14,82 %





Tabel III.12. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian	
Tujuan								
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	15,00-13,44 %	13,98 % (Maret 2023)	104,02 %				
	Persentase Desa Mandiri	19,94 %	36,26 %	181,89 %				
Sasaran 1								
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	86 %	87,06 %	101,23 %				
Program								
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase indikator program yang tercapai	85 %	100 %	117,65 %	23.803.1777.104	22.582.992.659	94,87 %	22,78
	Persentase realisasi anggaran	95 %	96,34 %	101,41 %				6,54
	Indeks profesionalitas ASN	70 %	83,42 %	119,17 %				24,30
Sasaran 2								
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa	12 %	23,35 %	194,50 %				
Program								
1. Program Penataan Desa	Persentase desa yang di proses penetapan dalam penataan desa	33,33 %	33,33 %	100 %	1.243.781.500	1.165.324.321	93,69 %	6,31
2. Program Peningkatan	Persentase	14,29 %	14,29 %	100 %	1.558.007.500	1.520.378.441	97,58 %	2,42



Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian	
Kerjasama Desa	peningkatan kerjasama desa							
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa cepat berkembang	25 %	61,79 %	247,17 %	18.180.120.522	17.751.277.231	97,64 %	149,53
	Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa	7 %	9,66 %	137,98 %				40,34
Sasaran 3								
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,65 %	6,34 %	173,88 %				
Program								
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,86 %	3,99 %	103,35	7.791.334.374	7.630.731.552	97,94 %	5,41
	Persentase produk unggulan UEM	4 %	6 %	150				152,06
	Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif	5 %	5 %	100				102,06



Tabel III.13. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase indikator program yang tercapai	117,65	94,87 %	22,78
	Persentase realisasi anggaran	101,41		6,54
	Indeks profesionalitas ASN	119,17		24,30
Program Penataan Desa	Persentase desa yang di proses penetapan dalam penataan desa	100	93,69	6,31
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	100	97,58	2,42
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa cepat berkembang	247,17	97,64	149,53
	Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa	137,98		40,34
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	103,35	97,94 %	4,76
	Persentase produk unggulan UEM	150,93		28,26
	Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif	100		102,33



## B. REALISASI ANGGARAN

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024, alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim pada Tahun 2023 sesuai Perjanjan Kinerja dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor : DPPA/B.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 sebesar Rp. 52.576.421.000,00. Adapun alokasi anggaran dimaksud untuk :

- a. Belanja Operasi           Rp. 51.745.339.000,00
  - ✓ Belanja Pegawai   Rp. 17.344.753.000,00
  - ✓ BBJ                   Rp. 34.400.646.000,00
- b. Belanja Modal           Rp. 831.022.000,00

Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 4 program pembangunan yaitu (i) Program Penataan Desa, (ii) Program Peningkatan Kerjasama Desa, (iii) Program Administrasi Pemerintahan Desa (iv) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 realisasi anggaran setelah PAPBD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dari alokasi sebesar Rp. 52.576.421.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 50.650.704.204,00 (96,34 %), sehingga terdapat sisa anggaran sampai dengan Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 1.925.716.796,00 (3,66 %) yang merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan kehati – hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selengkapnya realisasi anggaran belanja sebagaimana tabel III. 13. berikut :



Tabel III. 13. Alokasi dan Realisasi Program - Anggaran TA 2023

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>% REALISASI</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.803.1777.104	22.582.992.659	94,87 %
2	PROGRAM PENATAAN DESA	1.243.781.500	1.165.324.321	93,69 %
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1.558.007.500	1.520.378.441	97,58 %
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	18.180.120.522	17.751.277.231	97,64 %
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7.791.334.374	7.630.731.552	97,94 %
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>52.576.421.000</b>	<b>50.650.704.204</b>	<b>96,34 %</b>



### **C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

Dengan memperhatikan kualitas penerapan akuntabilitas, evaluasi yang telah diwujudkan dan keberlanjutan implementasinya serta rekomendasi, maka langkah – langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan akuntabilitas dengan menjadikan pemutakhiran dokumen perencanaan Renstra untuk menyesuaikan kondisi terkini dan penerapan penyusunan indikator kinerja individu yang selaras dan menjadi acuan dalam penyusunan SKP serta meningkatkan kapasitas SDM terkait implementasi dan evaluasi manajemen kinerja secara berkala.



## BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan masyarakat pada tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 ini menyajikan kondisi pencapaian target kinerja yang tercermin dalam capaian indikator sasaran yang utama dan analisis kinerjanya. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja 3 sasaran adalah sangat baik (diatas 100 %).

Pencapaian kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana rata-rata tahun 2021 pencapaian kinerja adalah sebesar 466,98 % dan 2022 sebesar 705,58 % sedangkan pada tahun 2023 sebesar 156,55 %, hal tersebut disebabkan antara lain optimalisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga dalam pencapaian target kinerja terdapat tingkat kemajuan yang signifikan terhadap target jangka menengah RPJMD 2019 – 2024. Hal tersebut antara lain didukung oleh pelaksanaan manajemen yang lebih baik, koordinasi antar pemangku kepentingan yang lebih intensif serta pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian technical assistance kepada kelompok sasaran.

Rata-rata realisasi anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang secara rata-rata telah mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat pencapaian Realisasi anggaran Tahun 2023 adalah sebesar 96,34 % sedangkan realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar 156,55 %, maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Tantangan pada tahun – tahun mendatang tentunya bukan hal yang mudah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur untuk terus berkomitmen memberdayakan masyarakat di Jawa Timur. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengatasi dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar hidupnya saja, tetapi perlu didukung antara lain dengan kebijakan yang *pro poor*, sinkronisasi program yang terpadu, penguatan kapasitas SDM dan lembaga



kemasyarakatan di desa, hal ini menjadi hal yang penting dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin menuju keberdayaan dan kemandirian.

Langkah-langkah yang akan diupayakan dalam pemberdayaan masyarakat ke depan adalah :

1. Optimalisasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Menumbuhkan kelompok – kelompok usaha baru di masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Provinsi Jawa Timur;
5. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.

Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan PD Provinsi Jawa Timur yang sudah baik dapat lebih ditingkatkan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi perlu dilakukan dengan lebih harmonis, mengingat berbagai target indikator dalam pencapaiannya perlu melibatkan PD/instansi pemerintah baik di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kab/Kota maupun dengan Pemerintah.

Surabaya, Desember 2023

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Ir. BUDI SARWOTO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681230 199303 1 004





# LAMPIRAN



1. Form Pendanaan Indikatif Pada Renstra

Tujuan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur										
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL	2021	2022	2023	2024	KONDISI AKHIR			
	Persentase Desa Mandiri	Jumlah desa mandiri dibagi jumlah desa di Jawa Timur	4,30%	6,41%	8,51%	19,94%	20,59%	20,59%			
	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	Jumlah penduduk miskin di desa dibagi jumlah penduduk di Jawa Timur	15,16%	15,17-14,09	15,11-13,78	15,00-13,44	14,86-13,09%	14,86-13,09%			
<b>SASARAN</b>									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	KET	
URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL	2022	2023	2024	KONDISI AKHIR	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		85%	85%	86%	86%	sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang sesuai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	2 Persentase peningkatan status desa	Jumlah desa cepat berkembang tahun ini dikurangi jumlah desa cepat berkembang tahun lalu dibagi jumlah desa cepat berkembang tahun lalu x 100%		11%	12%	13%	13%	Penguatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui percepatan tata kelola	Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan		
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	3 Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif tahun ini dikurangi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif tahun lalu, dibagi Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif tahun lalu x 100%		3,44%	3,65%	3,82%	10,91%	Penguatan lembaga kemasyarakatan dalam memperkuat kemandirian desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		



## 2. Perjanjian Kinerja



### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. BUDI SARWOTO, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, November 2023

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

**Ir. BUDI SARWOTO, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681230 199303 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	86	Penguatan Internal, Anggaran
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa	12 %	Proses Bisnis
3	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,65 %	Proses Bisnis

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 23.803.177.104,-	P-APBD
Program Penataan Desa	Rp. 1.243.781.500,-	P-APBD
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 1.558.007.500,-	P-APBD
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 18.180.120.522,-	P-APBD
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 7.791.334.374,-	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 52.576.421.000,-</b>	

Surabaya, November 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

**Ir. BUDI SARWOTO, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681230 199303 1 004



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas PMD Prov. Jatim Th. 2023

3. Rekapitulasi Data

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	% CAPAIAN 2023	TARGET RPJMD 2024	% TINGKAT KEMAJUAN SAMPAI 2024	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2023		
										PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	86	86	87,06	101,23%	86	101,23%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>23.803.177.104</b>	<b>22.582.992.659</b>	<b>94,87%</b>
									1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	322.500.000	321.756.011	99,77%
									2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	4.908.500	98,17%
									3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.020.000	80,40%
									4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	1.465.600	97,71%
									5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	1.045.000	69,67%
									6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.200.000	105.059.873	98,93%
									7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.300.000	87.185.670	98,74%
									1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.888.345.000	15.705.099.330	92,99%
									2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	795.961.581	788.855.370	99,11%
									3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.572.800	23.466.000	99,55%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas PMD Prov. Jatim Th. 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	% CAPAIAN 2023	TARGET RPJMD 2024	% TINGKAT KEMAJUAN SAMPAI 2024	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2023		
										PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4		5	6			7	8	9	10
									4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.897.100	40.871.950	95,28%
									5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	59.876.900	58.442.410	97,60%
									6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.216.000	63.652.151	97,60%
									7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	21.474.000	21.463.775	99,95%
									1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			#DIV/0!
									2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.593.143.237	2.588.881.212	99,84%
									1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.400.000	49.399.600	100,00%
									2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.542.688	58.463.950	99,87%
									3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.000.000	79.996.980	100,00%
									4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	184.364.798	184.235.000	99,93%
									5. Penyediaan Bahan/Material	115.126.000	115.121.500	100,00%
									6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada	5.000.000	4.991.502	99,83%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas PMD Prov. Jatim Th. 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	% CAPAIAN 2023	TARGET RPJMD 2024	% TINGKAT KEMAJUAN SAMPAI 2024	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2023		
										PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4		5	6			7	8	9	10
									1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	702.200.000	695.257.596	99,01%
									2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.188.607.000	1.182.499.835	99,49%
									1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	276.680.000	274.184.544	99,10%
									2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.770.000	122.669.300	99,92%
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa	12,00%	108,07%	23,35%	194,54%	55,00%	42,45%	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>1.243.781.500</b>	<b>1.165.324.321</b>	<b>93,69%</b>
									1. Fasilitasi Kab/Kota & Desa dlm rangka Penataan Desa	1.243.781.500	1.165.324.321	93,69%
									<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>1.558.007.500</b>	<b>1.520.378.441</b>	<b>97,58%</b>
									1. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.218.250.000	1.193.403.870	97,96%
									2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	339.757.500	326.974.571	96,24%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas PMD Prov. Jatim Th. 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	% CAPAIAN 2023	TARGET RPJMD 2024	% TINGKAT KEMAJUAN SAMPAI 2024	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2023		
										PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4		5	6			7	8	9	10
									<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>18.180.120.522</b>	<b>17.751.277.231</b>	<b>97,64%</b>
									1. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	265.000.000	233.592.551	88,15%
									2. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	300.000.000	299.264.097	99,75%
									3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.150.000.000	1.145.965.548	99,65%
									4. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	928.463.261	918.823.737	98,96%
									5. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	891.230.000	867.292.530	97,31%
									6. Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	125.000.000	124.815.101	99,85%
									7. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	1.805.841.761	1.790.206.010	99,13%
									8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1.106.391.500	1.068.057.301	96,54%
									9. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	5.495.754.000	5.353.983.018	97,42%
									10. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten / Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	6.112.440.000	5.949.277.338	97,33%





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas PMD Prov. Jatim Th. 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	% CAPAIAN 2023	TARGET RPJMD 2024	% TINGKAT KEMAJUAN SAMPAI 2024	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2023		
										PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4		5	6			7	8	9	10
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,65%	35,58%	6,34%	173,88%	10,91%	58,09%	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>7.791.334.374</b>	<b>7.630.731.552</b>	<b>97,94%</b>
									1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	104.887.500	98.161.759	93,59%
									2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	800.793.000	774.655.326	96,74%
									3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	263.141.700	261.856.737	99,51%
									4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.400.000.000	1.377.345.468	98,38%

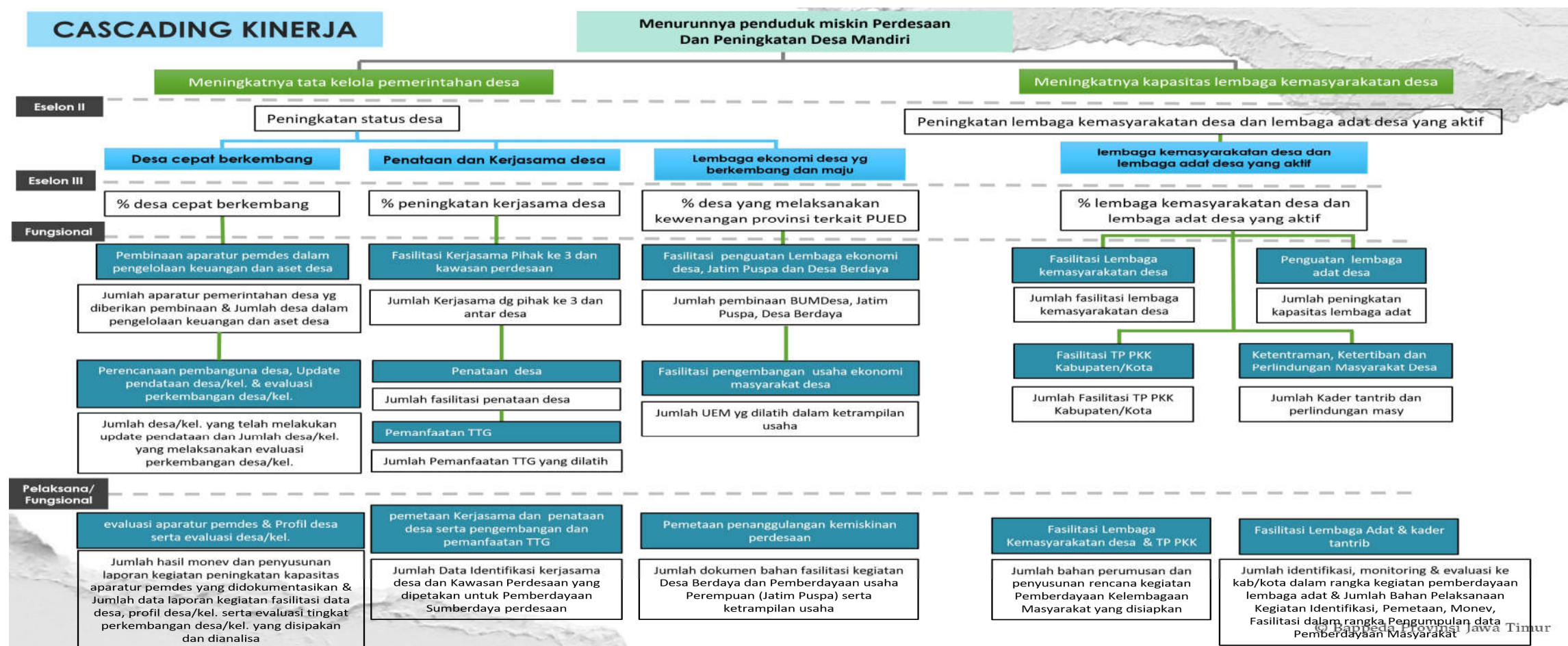


**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**  
**Dinas PMD Prov. Jatim Th. 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	% CAPAIAN 2023	TARGET RPJMD 2024	% TINGKAT KEMAJUAN SAMPAI 2024	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2023		
										PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4		5	6			7	8	9	10
									5. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	972.169.500	914.796.339	94,10%
									6. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	615.488.674	613.593.999	99,69%
									7. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	634.854.000	622.148.209	98,00%
									8. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.000.000.000	2.968.173.715	98,94%
						<b>156,55%</b>				<b>52.576.421.000</b>	<b>50.650.704.204</b>	<b>96,34%</b>



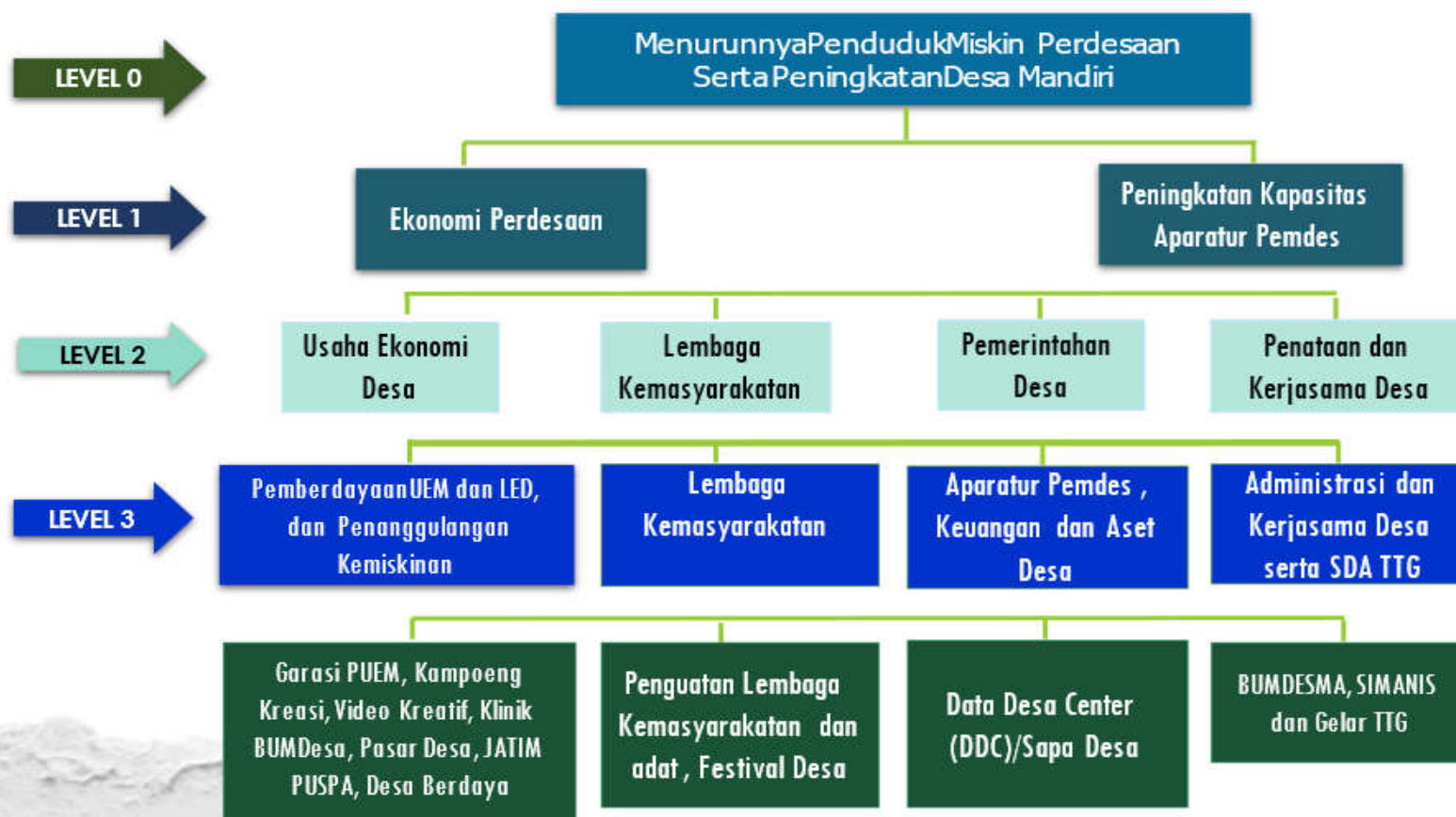
4. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD 2019 – 2024)





5. Peta Proses Bisnis

# PROSES BISNIS URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA





# Pohon Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Jawa Timur

**% PENDUDUK  
MISKIN PERDESAAN**

Per September 2022 (13,90%) masih  
lebih tinggi dari Perkotaan (7,78 %)

**% DESA MANDIRI**

**Belum Optimalnya Lembaga  
Ekonomi Desa**

Terdapat 84% (6.490 BUM  
Desa dari 7724 Desa)

Belum adanya Media  
publikasi dan pemasaran  
usaha ekonomi masyarakat

Terbatasnya akses usaha  
perempuan miskin

Belum Optimalnya kemitraan /  
kerjasama Lembaga ekonomi  
desa

Keterbatasan akses  
permodalan bagi BUM Desa  
Pemula

**Belum Optimalnya Lembaga  
Kemasyarakatan Desa Dan  
Lembaga Adat**

Masih sedikitnya jumlah  
LPMD yang sudah  
ditingkatkan kapasitasnya

Peningkatan Kapasitas  
Kader PKK baru

Masih sedikit Lembaga  
adat yang belum memiliki  
legalitas  
(Perdes / Perkades)

Sedikitnya Jumlah Kader  
Pemberdayaan  
Masyarakat yang terlatih

**Belum Maksimalnya Tata Kelola  
Pemdes, Kerjasama Desa dan  
pemanfaatan TTG**

Data Desa (APBDess/d  
Potensi Desa) belum tersedia  
dengan baik dan aman  
(Ketersediaan Data Desa)

Rendahnya Kapasitas  
Aparatur Pemdes  
dikarenakan Regulasi yang  
kurang mendukung

Perlu Peningkatan kapasitas  
terutama kades baru

Belum Optimalnya  
keuangan dan asset  
Pemdes

Belum optimalnya  
Kerjasama Desa/Kawasan  
Perdesaan

Belum optimalnya  
Pendayagunaan 41 Jenis  
TTG

Minimnya fasilitas  
penataan desa